

# **ANALYSIS WASTE MANAGEMENT BY DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (DKP) CITY OF SURABAYA**

Winda Yuni Aisah  
Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si

## **ABSTRACT**

Trash continues to be a problem for DKP city of Surabaya, low public awareness of the waste management from source to make waste management in the city of Surabaya is not maximized, limitations of the landfill and poor waste collection and transportation systems are less hygienic and not separate between organic and inorganic waste in the community. Therefore, the waste management needs to be analyzed by DKP city of Surabaya. The purpose of this study is to describe and analyze the waste management by DKP city of Surabaya.

This research is a descriptive study with a qualitative approach. This study focuses on waste management by DKP city of Surabaya in Aboejoewono. The informant were used as subjects in this study were employees of agencies, volunteers and community environments that manage waste. The process of data collection in this research used the method of observation, interviews, and documentation. Techniques of data analysis in this research is data collection, data reduction, data presentation, and verification.

The results showed that the DKP city of Surabaya has implemented a waste management according ideal Aboejoewono, by applying the five indicators of municipal solid waste management system that includes the ideal application of appropriate technology is done by the applied technology in Surabaya environmentally friendly "zero waste" through the separation of organic and inorganic waste, community participation in waste management is performed independently manage waste (household) and inorganic waste recycling, the mechanism of benefit in the management of such waste management activities and programs in the form of organic and inorganic waste compost household with Takakura Basket and recycle waste into products which can be sold for recycling, landfill optimization that has been managed by the private sector, and institutional waste management system that is integrated through the RT / RW and Environmental Kader.

Advice given the researcher is expected DKP city of Surabaya further optimize the role of the quality and quantity of environmental kader. In addition, waste management should be started in each household using environmentally friendly technologies through recycling and composting. Expected to further motivate the community to optimize the utilization of waste, so that it can be profitable through recycled products.

**Keywords:** Management, Waste, DKP city of Surabaya

# ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (DKP) KOTA SURABAYA

Winda Yuni Aisah  
Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si

## ABSTRAK

Sampah masih terus menjadi masalah bagi DKP Kota Surabaya, rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah dari sumbernya membuat pengelolaan sampah di Kota Surabaya belum maksimal, keterbatasan lahan TPA dan buruknya sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah yang kurang *hygenis* dan belum terpisah antara sampah organik dan anorganik di masyarakat. Untuk itu perlu dianalisis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DKP Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan sampah oleh DKP Kota Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah oleh DKP Kota Surabaya menurut Aboejoewono. Informan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah pegawai instansi, kader lingkungan dan masyarakat yang mengelolah sampah. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, *interview*, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKP Kota Surabaya telah menerapkan pengelolaan sampah kota ideal menurut Aboejoewono, dengan menerapkan kelima indikator sistem pengelolaan sampah kota ideal yang meliputi penerapan teknologi tepat guna dilakukan dengan menerapkan teknologi di Surabaya yang ramah lingkungan “zero waste” melalui pemisahan sampah organik dan anorganik, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dilakukan adalah mengelolah sampah mandiri (rumah tangga) dan daur ulang sampah anorganik, mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah seperti kegiatan dan program pengelolaan sampah organik dan anorganik berupa kompos rumah tangga dengan Keranjang Takakura dan mendaur ulang sampah menjadi produk daur ulang yang bisa dijual, optimalisasi TPA sampah yang sudah di kelola oleh swasta, dan sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi melalui RT/RW dan Kader Lingkungan.

Saran yang diberikan peneliti adalah DKP Kota Surabaya diharapkan lebih mengoptimalkan peran kualitas dan kuantitas kader lingkungan. Selain itu, pengelolaan sampah sebaiknya dimulai di masing-masing rumah tangga dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan melalui daur ulang dan kompos. Diharapkan lebih memotivasi masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sampah, sehingga bisa mendatangkan keuntungan melalui produk-produk daur ulang.

**Kata Kunci** : Pengelolaan, Sampah, DKP Kota Surabaya

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki permasalahan kompleks, salah satunya adalah permasalahan sampah. Sebagai kota terbesar ke dua setelah Jakarta, Surabaya memiliki beban dan tanggung jawab terhadap penanganan sampah, kesehatan dan kesejahteraan manusia. Sampah menjadi beban pemerintah Kota Surabaya karena sampah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit bagi masyarakat sekitar yang berpengaruh pada buruknya kesehatan. Masalah kesehatan tersebut dapat berupa penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan. Sedangkan dampak lain dari sampah diantaranya adalah pada perubahan iklim akibat adanya kenaikan temperatur bumi atau yang lebih dikenal dengan istilah pemanasan global. Pencemaran oleh sampah mempunyai banyak akibat buruk, yaitu menurunnya nilai estetika lingkungan. Tidak berhenti dari situ sampah yang menumpuk akan berpengaruh pada bahaya banjir akibat terhambatnya arus air di sungai karena terhalang oleh timbunan sampah yang dibuang ke sungai. (www.deliknews.com. diakses pada tanggal 25 Februari 2013).

Permasalahan sampah menjadi semakin penting untuk diperhatikan karena penduduk Surabaya di setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah dan hal itu menyebabkan pula pada bertambahnya volume sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari. Pengolahan sampah di Kota Surabaya saat ini sudah menerapkan 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), namun penanganan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dilakukan secara konvensional yaitu hanya diangkut dari tempat penghasil sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kemudian hanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Benowo. Sampah yang bisa dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya serta masyarakat Surabaya

sekitar 4.807,06 m<sup>3</sup> atau sekitar 53,9% dari total timbunan sampah yang mencapai 8.905 m<sup>3</sup>/hari. Meskipun kondisi saat ini masih teratasi, mulai dari distribusi sampai pengumpulan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Terakhir) Benowo. Namun demikian, persoalan sampah yang menggunung seolah akan menjadi bom waktu tersendiri bagi masyarakat Surabaya, apabila hal ini gagal teratasi maka Surabaya siap-siap menjadi kota sampah. (www.whatindonews.com, diakses pada tanggal 14 Agustus 2013).

Setiap tahunnya Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan untuk kota-kota di seluruh Indonesia yang dinyatakan sebagai kota besar terbersih dari pencemaran lingkungan, air, udara, lahan dan sisa hasil industri. Penghargaan tersebut adalah Adipura. Untuk tahun 2012 terdapat 4 kota besar yang dinyatakan terbersih di Indonesia, yaitu Malang, Balikpapan, Manado, dan Yogyakarta. Ada beberapa hal yang dinilai dari kota besar terbersih dari pencemaran lingkungan, air, udara, lahan dan sisa hasil industri tersebut, antara lain pengolahan sampah dengan penerapan 3R (*reuse, reduce, dan recycle*), pengendalian pencemaran air, keteduhan atau penghijauan, serta koordinasi antar sektor yang melibatkan peran aktif masyarakat. (National Geographic Indonesia 04 Juni 2012, diakses 5 Mei 2013).

Mendapatkan penghargaan Adipura setiap tahunnya tidak menjadikan Surabaya sebagai kota yang ideal dalam pengelolaan sampahnya. Terbukti dengan keterbatasan lahan untuk TPA yang masih menjadi problem bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, yang mana awal tahun 2000 terjadi masalah besar pada sektor persampahan di Kota Surabaya. Pada saat itu, Kota Surabaya memiliki 2 TPA, yaitu TPA Sukolilo yang luasnya 40,5 Ha dan TPA Lakarsantri yang luasnya 8,5 Ha. Namun adanya protes dari warga sekitar TPA yang mengeluhkan pencemaran dan ketidaknyamanan dari adanya TPA tersebut, pada akhirnya pertengahan tahun 2001 kedua TPA tersebut ditutup dan tidak lagi beroperasi. (Sumber: Dinas Kebersihan dan

*Pertamanan (DKP) Kota Surabaya tahun 2012*). Saat ini sampah di Kota Surabaya dibuang ke TPA Benowo yang berada di Jalan Romokalisari No.1 Surabaya. TPA di Benowo merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) satu-satunya yang digunakan Pemerintah Kota Surabaya untuk menampung sampah dari seluruh sumber sampah di Surabaya. Apabila sampah yang ada di TPA Benowo tidak ditangani secara serius, maka pada akhirnya nanti lahan untuk TPA Benowo akan semakin meluas karena belum mendapatkan pengganti lahan pembuangan sampah yang baru.

Masih belum tuntasnya polemik di lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) di Benowo, membuat Kota Surabaya terus dirundung permasalahan soal sampah. DPRD Surabaya meminta agar Pemkot sebagai regulator segera mencari solusi cepat dengan tetap mendengar suara warga. Cuaca hujan saat ini semakin membuat kondisi warga sekitar TPA di Benowo kelimpungan akibat bau sampah yang sangat menyengat dan wabah penyakit yang siap mengancam setiap saat. Karena hingga saat ini Kota Surabaya masih terbelenggu dengan persoalan sanitasi terutama yang menyangkut soal penampungan dan pengolahan sampah. Akibat pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Surabaya yang masih buruk, dan habisnya masa penempatan sampah sejak tahun 2007 di lokasi TPA di Benowo yang mulai menuai masalah dengan warga sekitar. ([www.kabargres.com](http://www.kabargres.com). Diakses pada tanggal 20 Juni 2013).

Merujuk pada uraian di atas, Aboejoewono menyebutkan bahwa, pembuangan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan pola pembuangan sampah yang sudah tidak relevan lagi dengan lahan kota yang semakin sempit dan penambahan penduduk yang pesat, sebab bila hal ini terus dipertahankan akan membuat kota dikepung "lautan sampah" sebagai akibat kerakusan pola ini terhadap lahan dan volume sampah yang terus bertambah. (Aboejoewono, 1999). Dalam teorinya Aboejoewono juga menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek

yang terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor teknis untuk menanggulangi persoalan sampah perkotaan atau lingkungan pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Namun pada kenyataannya di Kota Surabaya masih kurangnya kesadaran masyarakat didalam pengelolaan kebersihan lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan masih terus meningkat. (*Sumber: Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya tahun 2012*).

Terbukti dengan sampai saat ini di beberapa kampung, kawasan pemukiman dan termasuk sungai-sungai di Surabaya, masih banyak ditemui warga yang membuang sampah seenaknya. Dengan kondisi itu menunjukkan bahwa tidak semua warga punya kesadaran tinggi untuk mengatasi persoalan sampah yang setiap hari mereka hasilkan dari kegiatannya. Walikota Surabaya melakukan pantauan aliran sungai yang tersumbat oleh sampah, karena di musim hujan seperti ini aliran sungai yang tersumbat bisa menyebabkan banjir di pemukiman warga. Sungai yang menjadi pantauan Walikota Surabaya adalah sungai-sungai yang ada di Ketintang, Kenjeran, Kedinding, dan Kalisari. Sedikitnya membutuhkan 10 truk sampah untuk mengangkut sampah di sungai Kedinding sampai Kenjeran. Walikota Surabaya sudah menginstruksikan para lurah dan camat yang wilayahnya sering terjadi penyumbatan aliran sungai untuk melakukan sosialisasi kepada warganya agar tidak membuang sampah ke sungai. Namun upaya tersebut masih belum optimal, terbukti dengan masih banyaknya sampah di sungai-sungai Surabaya. ([www.suarasurabaya.net](http://www.suarasurabaya.net). Diakses tanggal 20 Juni 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dengan judul

## **“Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan masalah pembangunan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis penelitian ini sebagai bahan perbandingan antara teori yang di berikan pada waktu kuliah dengan kenyataan yang ada dan juga menambah pengetahuan serta pengalaman penelitian.
  - b. Bagi Universitas penelitian ini menambah referensi hasil penelitian dengan tema pembangunan daftar rujukan di Universitas Negeri Surabaya bagi penulis lain terkait pembahasan Analisis Pengelolaan Sampah Kota.
  - c. Bagi instansi atau organisasi penelitian ini memberi masukan bagi perbaikan pengelolaan sampah Kota Surabaya, khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

## **BAB II**

### **A. KAJIAN PUSTAKA**

#### **1. Definisi Pengelolaan Sampah**

Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari segala aktivitas yang kita lakukan

menghasilkan sampah. Dan setiap orang pasti pernah melihat sampah, namun tidak semua orang dapat mengartikan sampah secara *definitive*. Masing-masing orang tidak mungkin sama mengartikan sampah. Pengertian sampah menurut Tim Penebar Swadaya (2004:16) adalah suatu bahan yang terbuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jadi sampah dapat dikatakan sebagai bahan sisa yang sudah tidak dapat digunakan lagi.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005). Dalam Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Untuk mengatasi masalah sampah kaitannya dengan kebersihan kota bukanlah sekedar pekerjaan yang ringan, karena dibutuhkannya tenaga, fasilitas biaya dan lebih-lebih pemikiran serta ilmu pengetahuan tersendiri. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan.

Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke *landfill* yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Material sampah merupakan hasil dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radio aktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat. ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com). Diakses 20 Juni 2013). Selain itu, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007). Sedangkan menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan dengan dua tujuan yaitu, mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan mengelolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com). Diakses 20 Juni 2013).

## **2. Kegiatan Pengelolaan Sampah**

Mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), menggunakan ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan

diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah:

- a) Menetapkan sasaran pengurangan sampah
  - b) Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk
  - c) Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna ulang
  - d) Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang
  - e) Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang
- 2) Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Dalam perencanaan pengelolaan sampah, Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengharapkan pemerintah Kota/Kabupaten dapat membentuk semacam forum pengelolaan sampah skala Kota/Kabupaten atau Provinsi. Forum ini beranggotakan masyarakat secara umum, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi lingkungan/persampahan, pakar, badan usaha dan lainnya.

Hal-hal yang dapat difasilitasi forum adalah memberikan usul, pertimbangan dan saran terhadap kinerja pengelolaan sampah, membantu merumuskan kebijakan pengelolaan sampah, memberikan saran dan dapat menyelesaikan sengketa persampahan. Sampai saat ini, belum ada kebijakan nasional mengenal persampahan itu sendiri masih bersifat sosialisasi. Melihat di perkotaan penanganan

pengelolaan sampah sudah sangat mendesak, diharapkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dapat diimplementasikan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sejauh ini hanya mengelola sampah domestik saja, sementara untuk sampah khusus seperti B3 (bahan, berbahaya, dan beracun) dan sampah medis dikelola tersendiri oleh perusahaan/lembaga penghasil sampah tersebut. Sampah B3 (bahan, berbahaya, dan beracun) dari industri dikelola oleh industri dengan bekerjasama dengan pihak swasta, sedangkan sampah medis atau sampah rumah sakit dikelola oleh rumah sakit/klinik dengan kerjasama dengan rumah sakit yang telah memiliki *incenerator* atau mesin penghancur untuk sampah medis atau rumah sakit yang telah mendapat rujukan dalam pengelolaan sampah tersebut.

### 3. Sistem Pengelolaan Sampah Kota Ideal

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan politik khususnya mengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam teknis perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangannya. Hal ini diperlukan karena sampah pada dasarnya bukan sekedar permasalahan Pemda atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya saja, namun lebih dari itu merupakan masalah bagi setiap individu, keluarga, organisasi dan akan menjadi masalah negara bila sistem perencanaan dan pelaksanaannya tidak dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan.

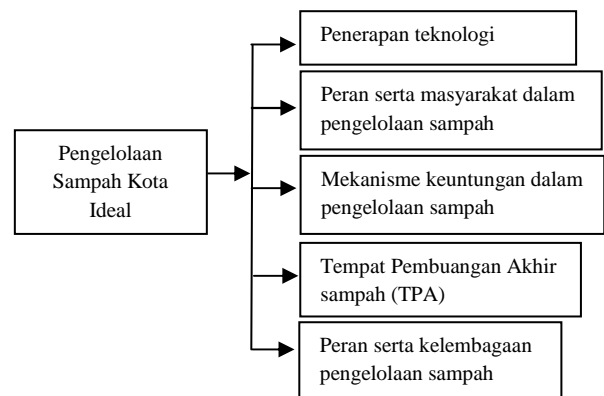
Aparat terkait sebaiknya tidak ikut secara teknis, ini untuk menghindari meningkatnya anggaran biaya penyelenggaraan, selain itu keterlibatan aparat terkait dikawatirkan akan membentuk budaya masyarakat yang bersifat tidak peduli. Pemerintah dan aparat terkait sebaiknya memosisikan kewenangannya sebagai fasilitator dan konduktor dan setiap permasalahan persampahan sebaiknya dimunculkan oleh masyarakat atau organisasi sosial selaku produsen sampah. Hal ini diharapkan terciptanya sikap masyarakat selaku individu, keluarga dan organisasi.

Dalam pengelolaan sampah terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Teori yang digunakan dalam konsep pengelolaan sampah ini adalah meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat.

Aboejoewono (1999) menyatakan bahwa perlunya pengelolaan sampah perkotaan yang ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu:

- a) Penerapan teknologi yang tepat guna
- b) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- c) Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
- d) Optimalisasi TPA sampah
- e) Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi.

**Gambar 2.1**  
**Pengelolaan Sampah Kota Ideal**



Penjelasan rinci dari Gambar 2.1 adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan teknologi yang tepat guna  
Teknologi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sampah ini merupakan kombinasi tepat guna yang

meliputi teknologi pengomposan, teknologi penanganan plastik, dan teknologi pembuatan kertas daur ulang. Teknologi Pengolahan Sampah Terpadu menuju “zero waste” harus merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi yang digunakan dalam proses lanjutan yang umum digunakan adalah:

- a) Teknologi pembakaran (*Incenerator*), dengan cara ini dihasilkan produk samping berupa logam bekas (skrap) dan uap yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Keuntungan lainnya dari penggunaan alat ini adalah:
  - i. dapat mengurangi volume sampah  $\pm$  75%-80% dari sumber sampah tanpa proses pemilahan.
  - ii. abu atau terak dari sisa pembakaran cukup kering dan bebas dari pembusukan dan bisa langsung dapat dibawa ke tempat penimbunan pada lahan kosong, rawa ataupun daerah rendah sebagai bahan pengurung (timbunan).
- b) Teknologi *composting* yang menghasilkan kompos untuk digunakan sebagai pupuk maupun penguat struktur tanah.
- c) Teknologi daur ulang yang dapat menghasilkan sampah potensial, seperti: kertas, *plastic* logam dan kaca/gelas.

## 2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor teknis untuk menanggulangi persoalan sampah perkotaan atau lingkungan pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Masyarakat senantiasa ikut berpartisipasi terhadap proses-proses pembangunan bila terdapat faktor-faktor yang mendukung, antara lain: kebutuhan, harapan, motivasi, ganjaran, kebutuhan sarana dan prasana,

dorongan moral, dan adanya kelembagaan baik informal maupun formal.

## 3) Mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah

Solusi dalam mengatasi masalah sampah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi terhadap semua program pengelolaan sampah yang di mulai pada skala yang lebih luas lagi. Misalnya melalui kegiatan pemilahan sampah mulai dari sumbernya yang dapat dilakukan oleh skala rumah tangga atau skala perumahan. Dari sistem ini akan diperoleh keuntungan berupa: biaya pengangkutan dapat ditekan karena dapat memotong mata rantai pengangkutan sampah, tidak memerlukan lahan besar untuk TPA, dapat menghasilkan nilai tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat lebih mensejahterakan petugas pengelola kebersihan, bersifat lebih ekonomis dan ekologis, dapat lebih memberdayakan masyarakat dalam mengelola kebersihan kota.

## 4) Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA)

Pada dasarnya pola pembuangan sampah yang dilakukan dengan sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah tidak relevan lagi dengan lahan kota yang semakin sempit dan pertumbuhan penduduk yang pesat, sebab bila hal ini terus dipertahankan akan membuat kota dikepung “lautan sampah” sebagai akibat kerakusan pola ini terhadap lahan dan volume sampah yang terus bertambah. Pembuangan yang dilakukan dengan pembuangan sampah secara terbuka dan di tempat terbuka juga berakibat meningkatnya intensitas pencemaran. Penanganan model pengelolaan sampah perkotaan secara menyeluruh adalah meliputi penghapusan model TPA pada jangka panjang karena dalam banyak hal pengelolaan TPA masih sangat buruk mulai dari penanganan air sampah (*leachet*) sampai penanganan bau yang sangat buruk.

## 5) Kelembagaan dalam pengelolaan sampah yang ideal.



Dalam pengelolaan sampah perkotaan yang ideal, sistem manajemen persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem manajemen yang berbasis pada masyarakat yang di mulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya merupakan cara atau tindakan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya untuk mengurangi volume sampah di Kota Surabaya. Kinerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya menjadi sorotan utama dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Aboejoewono (1999) tentang pengelolaan sampah kota ideal yang meliputi:

- 1) Penerapan teknologi yang tepat guna
- 2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 3) Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
- 4) Optimalisasi TPA sampah
- 5) Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi

## B. Kerangka Berpikir

Berikut adalah model kerangka berfikir dari penelitian ini:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada analisis pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya menurut Aboejoewono (1999). Informan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah pegawai instansi, kader lingkungan dan masyarakat yang mengelolah sampah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, *interview*, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, peneliti dapat mendiskripsikan pengelolaan sampah kota ideal melalui pengelolaan sampah yang digunakan berdasarkan pada teori Aboejoewono antara lain:

#### 1. Penerapan Teknologi yang Tepat Guna

Teknologi pengolahan sampah terpadu menuju “zero waste” harus merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, teknologi

yang digunakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya saat ini adalah teknologi pengomposan dan teknologi daur ulang sampah anorganik. Selain itu, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya juga menggunakan teknologi mendaur ulang sampah anorganik melalui kerjasama dengan negara Jepang dan daur ulang sampah organik yang dilakukan oleh masyarakat Kota Surabaya sendiri.

Berbagai penjelasan diatas, membuktikan bahwa penggunaan teknologi pengomposan dan pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas yang ramah lingkungan “zero waste” dengan menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya maupun masyarakat Surabaya sudah cukup jelas. Selain itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya telah menerapkan teknologi tepat guna secara optimal, karena teknologi yang tepat guna merupakan sistem pengelolaan sampah kota ideal yang diterapkan di Kota Surabaya.

## **2. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah**

Partisipasi yang diberikan masyarakat untuk membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya adalah dengan melibatkan diri untuk pengelolaan sampah dalam bentuk mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Mengelolah sampah organik untuk dijadikan kompos dan mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi kader lingkungan kepada masyarakat khususnya perkampungan yang padat penduduk.

Masyarakat senantiasa ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan sampah karena terdapat faktor-faktor yang mendukung seperti kebutuhan yang berupa pemberian stand di Mall-mall Surabaya dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, harapan berupa keinginan masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sampah daur ulang di Mall, motivasi yang bisa

mendorong masyarakat untuk terus mendaur ulang sampah berupa adanya lomba-lomba kebersihan yang diadakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, kebutuhan sarana dan prasarana yang diperoleh berupa pemberian tempat atau wadah untuk kompos rumah tangga yang diinginkan oleh masyarakat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya yang bekerjasama dengan pihak swasta, dan juga adanya kelembagaan baik formal maupun informal yang senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengelola sampah. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya sudah menerapkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sistem pengelolaan sampah kota ideal yang sudah diterapkan di Kota Surabaya.

## **3. Mekanisme Keuntungan dalam Pengelolaan Sampah**

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya melakukan himbuan kepada seluruh masyarakat untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos. Ada kerjasama yang dilakukan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dengan negara Jepang khususnya di Kota Kitakyushu dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Beberapa bentuk kegiatan untuk mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya adalah dengan memberikan kegiatan kepada masyarakat berupa pengelolaan sampah organik yang dijadikan kompos dan pengelolaan sampah anorganik untuk dijadikan produk daur ulang yang mempunyai nilai ekonomis dan bertujuan agar masyarakat Surabaya akan mendapat keuntungan dengan mengelolah sampah di skala rumah tangga, dapat lebih memberdayakan masyarakat dalam mengelolah kebersihan kota, dan sebaliknya Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya bisa mengurangi sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Tidak hanya itu, kegiatan pengelolaan sampah

dengan sistem mekanisme keuntungan bisa menekan biaya pengangkutan sampah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

#### **4. Optimalisasi TPA Sampah**

Metode pembuangan sampah dengan model TPA merupakan konsep yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya. Namun agar sampah yang masuk TPA tidak semakin bertambah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya melakukan reduksi sampah anorganik dengan menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) di TPA Benowo.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya sudah mengupayakan optimalkan TPA di Benowo dengan menangani pengomposan dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Namun masyarakat yang ada disekitar TPA Benowo masih mengeluhkan bau sampah yang setiap hari mengganggu, apalagi dimusim penghujan. Adanya partisipasi masyarakat Surabaya dalam pengelolaan sampah sangat membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya untuk mengurangi pengangkutan sampah ke TPA Benowo. Kerjasama dalam bentuk pengelolaan sampah di TPA Benowo dengan swasta (PT. Sumber Organik) merupakan langkah yang ditempuh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya agar tidak terjadi luas lahan untuk TPA Benowo.

#### **5. Sistem Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi**

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan terdapat beberapa kelembagaan dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya salah satunya adalah kelembagaan RT/RW. Kelembagaan RT/RW ini melalui koordinasi dengan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dalam pengangkutan sampah hasil kerja bakti warganya. Koordinasi tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh RT/RW setempat untuk menyampaikan masalah terkait dengan sampah yang ada di wilayahnya kepada

pegawai lapangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti dapat memberi gambaran bahwa, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya telah lebih maju dalam meningkatkan pengelolaan sampah kota ideal, karena sudah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk terus mereduksi sampah anorganik dengan menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) dan mengelola sampah organik menjadi kompos melalui lembaga RT/RW dan kader lingkungan kepada masyarakat Kota Surabaya.

#### **B. Pembahasan**

Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya adalah:

##### **1. Penerapan Teknologi yang Tepat Guna**

Penerapan teknologi pengomposan dan daur ulang sampah anorganik tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya telah berupaya dalam meningkatkan pengelolaan sampah untuk mewujudkan kebersihan kota. Namun, penerapan teknologi di Surabaya yang ramah lingkungan “zero waste” melalui pemisahan sampah organik dan anorganik belum dilakukan secara menyeluruh baik dari masyarakat maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Penerapan teknologi tersebut juga tidak semata-mata untuk pencapaian tujuan saja, akan tetapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya juga memperhitungkan baik buruknya dari penggunaan teknologi pengelolaan sampah yang digunakan saat ini, sehingga penggunaan teknologi tersebut dapat mendukung pelaksanaan program Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya.

##### **2. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan dari hasil observasi, masyarakat senantiasa ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan sampah karena terdapat faktor-faktor yang mendukung seperti kebutuhan yang berupa pemberian stand di Mall-mall Surabaya dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, harapan

berupa keinginan masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sampah daur ulang di Mall, motivasi yang bisa mendorong masyarakat untuk terus mendaur ulang sampah berupa adanya lomba-lomba kebersihan yang diadakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, kebutuhan sarana dan prasarana yang diperoleh berupa pemberian tempat atau wadah untuk kompos rumah tangga yang diinginkan oleh masyarakat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya yang bekerjasama dengan pihak swasta, dan juga adanya kelembagaan baik formal maupun informal yang senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengelola sampah. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang, terbukti dengan peran serta masyarakat untuk mengolah sampah mandiri (rumah tangga) masih belum dilakukan secara maksimal.

### **3. Mekanisme Keuntungan dalam Pengelolaan Sampah**

Dalam hal ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya yang menjalin kerjasama "*Green Sister City*" dengan tiga kota di dunia, yaitu Busan (Korsel), Kochi (Jepang), dan Seattle (USA), merupakan langkah awal agar pengelolaan sampah di Surabaya lebih baik. Seperti teori yang dikemukakan oleh Aboejoewono mengenai perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya telah memberikan program dan kegiatan untuk masyarakat Surabaya dalam mengelola sampah dengan tetap memperhitungkan keuntungan yang nantinya diperoleh masyarakat dari hasil mengelola sampah.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya telah menerapkan sistem mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah dengan bentuk pemberian kegiatan pengelolaan sampah organik dan anorganik yang bertujuan agar masyarakat Surabaya akan mendapat keuntungan dengan mengelola sampah diskala

rumah tangga, kompos hasil pengolahan sampah digunakan oleh masyarakat untuk penghijauan kampung dan sebagian dapat dijual untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat, serta dapat lebih memberdayakan masyarakat dalam mengelola kebersihan kota, dan sebaliknya Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya bisa mengurangi pengangkutan sampah di perkampungan dan menurunnya volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Selain itu, dikembangkannya bank sampah di Surabaya sebagai program lain dalam pengelolaan sampah yang sangat antusias diikuti oleh masyarakat. Hasil pengelolaan sampah dari daur ulang dan kompos dapat menghasilkan keuntungan bagi komunitas yang aktif memanfaatkan sampah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah berbasis komunitas sehingga diharapkan terjadi pengurangan sampah di sumber sampah nantinya.

### **4. Optimalisasi TPA Sampah**

Optimalisasi TPA yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Surabaya, agar sampah yang masuk TPA tidak semakin bertambah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya melakukan reduksi sampah anorganik dengan menerapkan konsep 3R (*reuse, reduce, dan recycle*) dan *mengelola sampah organik menjadi kompos* di TPA Benowo. Berdasarkan hasil pengelolaan sampah tersebut, volume sampah yang masuk di TPA bisa terealisasikan dari target yang diinginkan. Meskipun hasilnya belum maksimal, namun upaya pengelolaan sampah berbasis komunitas akan terus dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya.

Saat ini sejak bulan Nopember 2012 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Benowo sudah dikelola oleh pihak swasta (PT. Sumber Organik), sehingga Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya tidak mengetahui alat apa yang nantinya

dipergunakan untuk mengelola sampahnya. Pihak swasta (PT. Sumber Organik) dituntut untuk bisa mengelola sampah menjadi gas, listrik dan pupuk paling lambat dua tahun sejak ada persetujuan kerjasama. Diharapkan dengan kerjasama tersebut sampah yang ada di TPA Benowo bisa tertangani dengan teknologi yang tepat guna dari pihak swasta (PT. Sumber Organik). Meskipun teori yang dikemukakan oleh Aboejoewono menjelaskan bahwa penghapusan model pembuangan sampah dengan TPA harus dilakukan, karena lahan kota yang sempit dan bisa mencemari lingkungan sekitar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya sudah menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah agar bisa memperpanjang usia TPA di Benowo.

#### **5. Sistem Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi**

Kebersihan kota merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga Surabaya, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya lembaga yang berperan dalam masyarakat terkait pengelolaan sampah. Karena salah satu penyebab meningkatnya volume sampah adalah kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sangat kurang dan kesadaran masyarakat didalam pengelolaan kebersihan lingkungan juga masih kurang, akibatnya banyak aspek ilegal dalam pengelolaan sampah di masyarakat.

Berdasarkan berbagai persoalan mengenai rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, diperlukan suatu lembaga dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi agar terwujudnya kebersihan dan keindahan kota. Dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya telah menerapkan kelembagaan dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi sebagai pihak yang mensosialisasikan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Terdapat beberapa kelembagaan dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya salah satunya adalah kelembagaan RT/RW. Selanjutnya adalah lembaga melalui tokoh-tokoh masyarakat yaitu

kader lingkungan, dari lembaga ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya bisa mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan cara mengundang kader lingkungan di masing-masing kelurahan untuk menyampaikan keluhan masyarakat mengenai sampah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya telah lebih maju dalam meningkatkan pengelolaan sampah kota ideal, karena sudah menerapkan sistem kelembagaan yang terintegrasi namun belum optimal aktivitasnya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya telah menggunakan teknologi pengolahan sampah terpadu menuju "*zero waste*" dan memperhitungkan baik buruknya dari penggunaan teknologi pengelolaan sampah yang digunakan saat ini, sehingga penggunaan teknologi tersebut dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan program pengelolaan sampah untuk kebersihan kota.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya juga telah berupaya agar masyarakat senantiasa terus berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dengan memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berhasil mereduksi sampah. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang, terbukti dengan peran serta masyarakat untuk mengelolah sampah mandiri (rumah tangga) masih belum dilakukan secara maksimal. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya telah menerapkan sistem mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah dengan bentuk pemberian kegiatan dan program pengelolaan sampah organik dan anorganik, berupa kompos rumah tangga dengan Keranjang Takakura dan mendaur ulang sampah anorganik menjadi produk daur ulang yang bisa dijual. Hasil

pengelolaan sampah dari daur ulang dan kompos dapat menghasilkan keuntungan bagi komunitas yang aktif memanfaatkan sampah.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya telah mensosialisasikan kepada masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan sampah kota ideal untuk terus mereduksi sampah anorganik dengan menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan program kompos merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui sosialisasi oleh kader lingkungan kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan mendaur ulang sampah anorganik menjadi produk daur ulang yang bisa dijual. Namun, pengelolaan sampah di TPA Benowo sejak tahun 2012 sudah di lelang ke pihak swasta (PT. Sumber Organik). Dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya sudah menerapkan sistem kelembagaan yang terintegrasi namun belum optimal aktivitasnya, sebagai pihak yang mensosialisasikan pengelolaan sampah kepada masyarakat, lembaga tersebut adalah kelembagaan RT/RW. Selanjutnya adalah lembaga melalui tokoh-tokoh masyarakat yaitu kader lingkungan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilaksanakan tentang pengelolaan sampah kota ideal di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat berguna agar dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah dapat tetap berjalan dengan baik. Saran tersebut antara lain:

1. Dengan adanya teknologi daur ulang sampah anorganik yang bekerjasama dengan Negara Jepang saat ini di Super Dipo Sutorejo, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya perlu mengoptimalkan teknologi daur ulang sampah anorganik lagi di 175 TPS yang ada di Surabaya, salah satunya dengan melibatkan pihak swasta untuk melaksanakan teknologi daur ulang sampah anorganik tersebut. Selain itu, pengelolaan

sampah sebaiknya dimulai di masing-masing rumah tangga dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan melalui daur ulang dan kompos.

2. Saat ini peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang meliputi pelaksanaan sosialisasi budaya bersih, lomba kebersihan dan operasi yustisi kebersihan serta upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengelola dan mengolah sampah sudah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya. Diharapkan lebih mengoptimalkan peran kualitas dan kuantitas kader lingkungan, sehingga dapat mengoptimalkan sistem kelembagaan pengelolaan sampah di Surabaya.
3. Kegiatan dan program yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya kepada masyarakat Surabaya dalam bentuk mendaur ulang sampah organik menjadi kompos dan mendaur ulang sampah anorganik menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis. Diharapkan lebih memotivasi masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sampah, sehingga bisa mendatangkan keuntungan melalui produk-produk daur ulang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aboejoewono. 1999. Pengelolaan Situ-situ di Wilayah DKI Jakarta. Semiloka Nasional Pengelolaan dan Pemanfaatan Danau dan Waduk. Bogor 30 November 1999. PPLH-IPB dan Ditjen Bangda Depdagri, Ditjen Pengairan, dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Bima Karya
- \_\_\_\_\_. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya Tahun 2012

E. Kristi, Poerwandari. 1998. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kementerian Lingkungan Hidup. 2005

Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis, dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

Miles, B.B., dan A.M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press

Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nawawi, Hadari. 2007. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya Tahun 2012

Renstra (SKPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya Tahun 2011-2015

Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penulis PS. 2008. *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Jakarta : Penebar Swadaya.

Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

#### **Referensi Dari Internet**

<http://deliknews.com>. *Pemanfaatan Sampah Sebagai Upaya Mengurangi Pemanasan Global*. (diakses tanggal 25 Februari 2013)

<http://deliknews.com>. *Bertambahnya Sampah Akibat Pertambahan Penduduk Di Surabaya*. (diakses tanggal 25 Februari 2013).

<http://suarakawan.com>. *7 Titik Daerah Surabaya Rawan Banjir*. (diakses tanggal 3 Maret 2013)

<http://suarasurabaya.net>. *Sampah Akan Jadi Persoalan Serius Surabaya*. (diakses tanggal 20 Juni 2013)

<http://suarasurabaya.net>. *Sungai-Sungai Penuh Sampah Di Awal Penghujan*. (diakses tanggal 20 Juni 2013)

<http://kabargress.com>. *Cuaca Hujan, Ancam Kehidupan Warga Sekitar TPA Benowo*. (diakses tanggal 20 Juni 2013)

<http://wikipedia.com>. *Pengelolaan Sampah*. (diakses tanggal 24 Mei 2013)

<http://whatindonesia.com>. *Sampah Bom Waktu Warga Surabaya*. (diakses tanggal 14 Agustus 2013)

#### **Referensi Jurnal Penelitian**

Ayuningtias, Tisna. 2010. *Kajian Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya*. *Tesis* tidak diterbitkan. Surabaya: Teknik Lingkungan ITS.

Pakpahan, Hotmawati Lidya. 2010. *Manajemen Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Pengembangan Kota Medan Berwawasan Lingkungan*. *Tesis* tidak diterbitkan *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan pada Sekolah UNSUT*.

Raharja, Y. T., K. Mudikdjo, F. G. Suratmo, B. S. Utomo . 1988. *Studi Sosial Ekonomi Pengelolaan Limbah Pemukiman (sampah) dengan Sistem Jali-jali di Jakarta Pusat*. *Tesis* Program Pascasarjana IPB. Tidak Diterbitkan.

Santoso, Muhamad Ervan. 2011. *Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Kebersihan Di Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Di Kecamatan Tambaksari Surabaya)*. *Skripsi* tidak diterbitkan. Administrasi Negara UPN.